BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga pemerintahan. Pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas realisasi anggaran daerah. Pemerintah selalu mengupayakan untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dengan cara penyampaian laporan pertanggungjawaban atas keuangan negara yang harus memenuhi syarat tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.[2]

Fenomena perkembangan pemerintahan di Indonesia saat ini adalah tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas keuangan adalah pemberian informasi atas aktivitas dalam menjaga keakuratan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be*

[2] Harun, *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 53

heard and to be listened).[3] Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Transparansi merupakan hak masyarakat untuk mengetahui akan kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam mengelola sumber daya di daerah dan hasil pengelolaan sumber daya di daerah. Tranparansi pengelolaan keuangan diyakini dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Trasparansi dan pemberian informasi kepada publik diharuskan karena telah diatur pada PP No. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Munculnya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan instruksi dalam negeri tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah seharusnya menjadi awal terlaksananya transparansi pengelolaan keuangan daerah. Transparansi bisa meningkatkan prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanaggungjawaban pemeritah daerah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.[4] Pemerintah daerah seharusnya menyiapkan website ataupun sarana apapun untuk dapat diakses oleh pihak yang ingin mengetahui bagaimana pemerintah

---

[3] Sintike Mentari, David Paul, dan Agus tony, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada SKPD Kabupaten Kepulauan Taulad), *ejournal-unsrat riset akuntansi dan audit*, Vol. 7 No. 2 tahun 2016, hal. 14

[4] Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

mengelola anggaran daerah. Transparansi informasi keuangan daerah juga merupakan salah satu pencegahan terjadinya perilaku korupsi. Oleh sebab itu, diperlukan Transparansi pengelolaan keuangan daerah berupa penyediaan informasi pengelolaan keuangan daerah di situs resmi pemerintah daerah, merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi, karena adanya transparansi pengelolaan keuangan diyakini dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD disusun serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.[5] Kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan atas kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penyusunan laporan keuangan diharapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) diharapkan memenuhi karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Indonesia yakni relavan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, berarti pemerintah

[5] Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.[6]

Laporan keuangan daerah akan disajikan setiap tahunnya dan akan mendapatkan penilaian dari BPK, penilaian tersebut yang berupa opini. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas sebagaimana yang telah diatur di dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yakni : opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TP) dan Pernyataan Menolak memberi opini.[7]

Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukun dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.[8]

Selain penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tepat hal lain yang mendasar dan terpenting dalan penyusunan laporan keuangan

---

[6] Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

[7] Undang- undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

[8] Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia yang berkompetensi dan berkualitas. Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, karena yang menyusun laporan keuangan adalah pegawai yang memahami dan menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan.[9] Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka sangatlah dibutuhkan kemampuan pengelola yang memahami dan berkompeten dalam bidangnya**.** Menurut Bastian menyatakan bahwa penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan pegawai yang menguasai akuntansi pemerintahan.[10] Kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.[11] Kompetensi merupakan keahlian yang dimiliki seseorang melalui pendidikan dan pelatihan untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan tugasnya.[12] Kompetensi pegawai adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Sehingga kompetensi pegawai dapat sangat berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

---

[9] Imelda Latjandu, Lintje Kalangi, dan Jantje J. Tinangon, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten kepulauan taulad*", Jurnal Accountability*, Vol. 5 No. 2, 2016, hal. 99

[10] Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: suatu pengantar*, (jakarta: Erlangga, 2006), hal. 55

[11] Kadek Desiana, Nyoman Trisna, dan Ni Kadek Sinarwati, " Pengaruh Kompetensi SDM, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhaap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.2, No. 1, 2014

[12] Lia Hanifa, "Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*", Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2016, hal. 66

Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah susuanan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan.[13] Sistem tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan. Dimasa sekarang ini sudah banyak perkembangan dibidang teknologi yang menunjang berbagai aktivitas dan operasi dalam suatu organisasi. Pemerintah yang dulunya menggunakan sistem manual kini telah berkembang dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi yang berbasis komputerisasi. Sistem informasi akuntansi yang merupakan kumpulan atas informasi data keuangan dan data lainnya yang akan diubah menjadi dalam sebuah informasi untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual ataupun terkomputerisasi. Dengan adanya sistem informasi akuntansi dapat membantu aparatur untuk menciptakan sebuah informasi yang sangat bermanfaat bagi penggunanya. [14]

Kota kediri telah melakukan pelaporan atas penggunaan dana pemerintah dan menyajikannya dalam laporan keuangan yang akan

---

[13] Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 4

[14] Ni Putu Yogi Merta dan I Made Pradana, "Pengaruh Pemahaman SAP danPemanfaatan SIA Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana", *e-journal S1 Ak Vol 2 No. 1 Tahun 2014*

diperiksa oleh BPK. BPK akan melakukan pengauditan dan akan memberikan penilaian atas laporan tersebut dengan mengeluarkan opini. Kota kediri pernah mendapakan opini WDP, WTP-DPP, WTP.[15] WDP merupakan opini wajar dengan pengecualian, dimana dalam opini tersebut dikeluarkan karena sebagian besar dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material. Sebenarnya opini ini dikeluarkan karena terdapat ketidakwajaran dalam hal tertentu, namun ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. WTP-DPP merupakan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Opini ini dikeularkan ada beberapa keadaan yang mengharuskan auditor menambahkan suatu penjelasan, mungkin karena adanya ketidak konsistenan dalam penerapan prinsip akuntansi. WTP merupakan opini yang akan terbitkan jika laporan keuangan disajikan dengan baik dan bebas salah saji. Opini ini dikeluarkan karena telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.[16]

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya dilakukan oleh Lilis Setyowati, Wikan Isthika dan Ririh Dian Pratiwi yang menyatakan bahwa peran teknologi informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar

---

[15] Danang Wahyu Pribadi, "Pengaruh Kinerja Pengelola Keuangan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kediri", *Jurnal Simki-Economic,* Vol. 02, No. 07, 2018, hal. 3

[16] Dr. Junaidi dan Dr. Nurdiono, *Kualitas Audit Perspektif Opini Going Concern,* (Yogyakarta : ANDI, 2016), hal. 4

akuntansi pemerintahan, dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas kualitas laporan keuangan.[17] penelitian ini berbeda dengan Riedy Riandani dengan hasil penelitian bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.[18] Lia Hanifa kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara baik secara parsial maupun simultan, dan menyatakan bahwa semakin baik kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah maka akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas.[19] Surya Adhitama menyimpulkan bahwa Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. [20]

---

[17] Lilis Setyowati, et. al., " Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang", *KINERJA*, Vol. 20, No. 2, 2016, hal. 190

[18] Riedy Riandani, "Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kab. Limapuluh Kota)", *Jurnal akuntansi*, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 50

[19] Lia Hanifa, "Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2016, hal. 77

[20] Surya Adhitama, "Pengaruh Penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ogan Ilir", *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, Vol. 5, No. 2, 2017

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Danang Wahyu tentang pengaruh kinerja pengelola keuangan dan penerapan sistem akuntansi daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan studi kasus pada BPPKAD Kota Kediri menyatakan bahwa pemerintahan daerah masih belum menyusun laporan keuangan dengan benar dan memahami sistem akuntansi. Hal tersebut terjadi karena sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan Gubernur atau Bupati atau Walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Sehingga menyimpulkan bahwa laporan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah kota kediri masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. [21]

Gambar 1.1
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

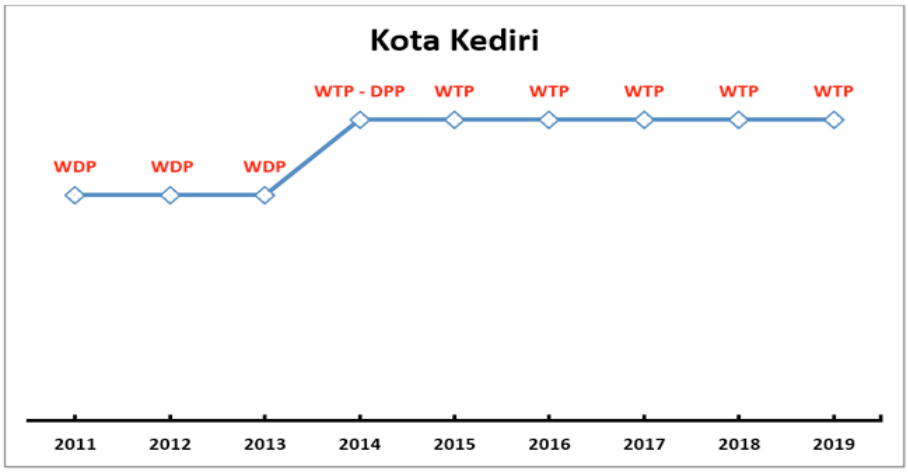

Sumber : https://jatim.bpk.go.id/lkpd-kota-kediri/

[21] Danang Wahyu Pribadi, "Pengaruh Kinerja Pengelola Keuangan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kediri", *Jurnal Simki-Economic*, Vol. 02, No. 07, 2018

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada taun 2011-2013 Kota Kediri masih belum optimal dalam menyajikan laporan keuangan. Kota Kediri mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa masalah yaitu bukti yang diberikan kurang cukup, dan lingup audit dibatasi. Namun, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keungan. Pada tahun 2014 Kota Kediri meningkatkan kinerjanya dan berusaha menyajikan laporan keuangan dengan baik dan usaha merka membuahkan hasil yaitu dengan mendapatkan opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Deangan Paragraf Penjelas) auditor mengeluarkan opini tersebut karena ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelas. Keadaan tersebut yaitu ketidakkonsistenan dalam menerapkan prinsip akuntansi. Pada tahun 2015-2019 Kota Kediri mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) opini tersebut berhasil diaraih kota kediri selama lima tahun berturut-turut. Tentu bukan hal yang mudah untuk mencapai keberhasilan tersebut. Kota Kediri telah menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam menyusun laporan keuangan dengan baik dan dengan opini WTP. Penghargaan tersebut diberikan karena telah mempertahankan opini WTP berturut-turut dalam lima tahun ini.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Danang dalam penelitian di BPPKAD Kota Kediri membuktikan bahwa pemerintah kota kediri belum memenuhi kriteria informasi yang disyaratkan. Mengingat

bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan.[22] Akan tetapi dalam lima tahun ini Kota Kediri telah mendapatkan penghargaan karena dapat mempertahankan opini WTP serta penelitian tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang mendapatkan hasil berbeda-beda sehingga masih belum konsisten. Sehingga peneliti ingin meneliti kembali mengenai kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah. Terkait dalam kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor khususnya penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi pegawai, dan pemanfaatan atas sistem informai akuntansi. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Pegawai, Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada BPPKAD Kota Kediri)".

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini mengacu pada bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kompetensi pegawai, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi guna untuk mengatahui apakah dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yang disajikan oleh pemerintah Kota Kediri.

[22] Danang Wahyu Pribadi, "Pengaruh Kinerja Pengelola Keuangan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kediri", *Jurnal Simki-Economic*, Vol. 02, No. 07, 2018, hal. 4

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri?
2. Apakah kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri?
3. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri?
4. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi pegawai, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri

3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi pegawai, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan terkait dengan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi pegawai, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Secara Praktis

   a. Bagi penulis

      Manfaat dari penelitian ini akan menjadikan tambahan wawasan mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi pegawai, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini juga akan dapat dijadikan membantu mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diambil dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya. Dengan adanya penelitian ini akan menambah pengetahuan bagi para akademisi tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait peningkatan kinerja dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan maka peneliti membatasi penelitian ini dengan menitik beratkan pada tiga komponen yaitu: penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi pegawai, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Hal ini dilakukan agar fokus dalam penelitiannya.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Kediri. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah pegawai bagian poengelola keuangan di BPPKAD Kota Kediri.

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

   a. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan. SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan akuntansi (PSAP), PSAP merupakan SAP yang diberi nomor, judul, isi dan tanggal berlaku.[23]

b. Kompetensi pegawai

Menurut wibowo kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas ketrampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.[24] Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46 A Tahun 2003 menyatakan bahwa Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

c. Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan PP No. 65 tahun 2010 menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan juga data terkait lainnya menjadi

[23] Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
[24] Wibowo, *Manajemen Kinerja (edisi 3),* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hal. 324

informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah.[25]

d. Laporan keuangan

Menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.[26]

2. Penegasan Operasional

a. Standar Akuntansi Pemrintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah suatu pedoman yang berisi prinsip-prinsip dalam penyajian laporan keuangan pemerintah.

b. Kompetensi pegawai

Kompetensi pegawai adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang pegawai berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

c. Sistem informasi akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mencatat, mengumpulkan, menggolongkan dan menyimpan seluruh data keuangan suatu entitas.

---

[25] Peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang sistem infoemasi keuangan daerah
[26] Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan

d. Laporan keuangan

Laporan keuangan adalah sebuah catatan atau laporan yang berisi informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi.

H. Sistematika Penulisan

Susunan skripsi teratur secara sistematis dan runtut secara lajur penyajian laporan penelitian lebih terarah maka diperlukan sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam skripsi yang disusun diharapkan seperti berikut ini:

1. Bab I Pendahuluan

   Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teori

   Berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, kemudian hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

   Berisi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian

Berisi hasil dan pembatasan penelitian yang menguraikan analisis menyeluruh atas penelitian yang dilaksanakan.

5. Bab V Pembahasan

   Pembahasan penelitian pada bab 4 yang dikaitkan pada penelitian yang terdahulu.

6. Bab VI Penutup

   Berisi kesimpulan serta saran dan keterbatasan dari penulis yang merupakan hasil dari penelitian yang dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.